



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

JALAN SILIWANGI NOMOR 355-357 SEMARANG 50146 TELEPON 7604640, 7605660, 7605700
FAKSIMILE. 7607697 LAMAN : [HTTP://WWW.PERHUBUNGAN.JATENGPROV.GO.ID](http://WWW.PERHUBUNGAN.JATENGPROV.GO.ID)
SURAT ELEKTRONIK : PERHUBUNGAN@JATENGPROV.GO.ID

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu – isu Strategis.....	3
1.2.1 Aspek Strategis Organisasi	3
1.2.2 Permasalahan Utama	4
1.2.3 Isu Strategis.....	5
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	10
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.....	11
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	14
2.2 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja	19
2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	20
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	29
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025.....	30
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	31
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Akhir RPJMD	33
3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan..... Standar Nasional	34
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	35
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	37
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	38
3.2 Realisasi Anggaran	48
3.3 Inovasi.....	52
3.4 Penghargaan.....	53
BAB 4 PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Rekomendasi.....	57
LAMPIRAN	58
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	58
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Isu Strategis..... 5

Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Lokasi Kerja 7

Tabel 1. 3 Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2025 8

Tabel 1. 4 Dukungan Anggaran Tahun 2025 10

Tabel 1. 5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025..... 11

Tabel 1. 6 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024..... 11

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 15

Tabel 2. 2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 16

Tabel 2. 3 Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025 20

Tabel 2. 4 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2025 Perubahan Pada Urusan Perhubungan..... 20

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 29

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 29

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 30

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya 32

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025..... 33

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Akhir RPJMD 34

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional..... 34

Tabel 3. 8 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan 35

Tabel 3. 9 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 37

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2025..... 38

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2025..... 41

Tabel 3. 12 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan	2
Gambar 1. 2 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Perhubungan	2
Gambar 1. 3 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Perhubungan	2
Gambar 1. 4 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 3 Dinas Perhubungan	3
Gambar 1. 5 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 4 Dinas Perhubungan	3
Gambar 1. 6 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan (orang).....	7
Gambar 1. 7 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (orang).....	8
Gambar 2. 1 Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan berbasis e Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan (Pake-Siska).....	28
Gambar 2. 2 Sistem Informasi Geografis.....	28
Gambar 3. 1 Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan.....	43
Gambar 3. 2 Pemasangan Perlengkapan Jalan	43
Gambar 3. 3 Penyerahan Life Jacket.....	44
Gambar 3. 4 Pemasangan Rambu Peringatan Keselamatan Penyeberangan Sungai	44
Gambar 3. 5 Pemasangan Rambu Peringatan.....	45
Gambar 3. 6 Pemasangan Rambu <i>Cross Andrea</i>	45
Gambar 3. 7 Pembangunan Terminal Kutoarjo Tahap 5	46
Gambar 3. 8 Peningkatan Prasarana Trans Jateng	47
Gambar 3. 9 Aplikasi Si-Anteng	53
Gambar 3.10 Penghargaan juara 1 Pembina terbaik dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	54

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Semarang, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. Arief Djatmiko, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19710914 199703 1 006

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

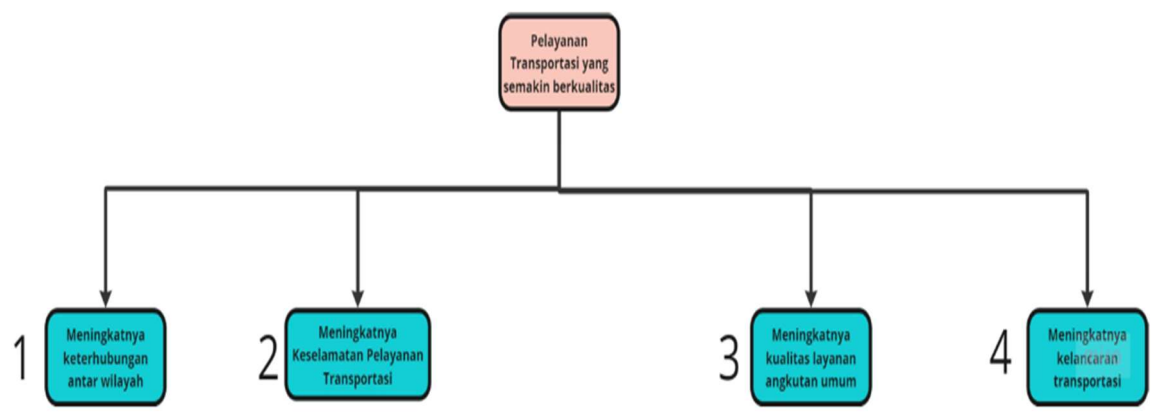
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

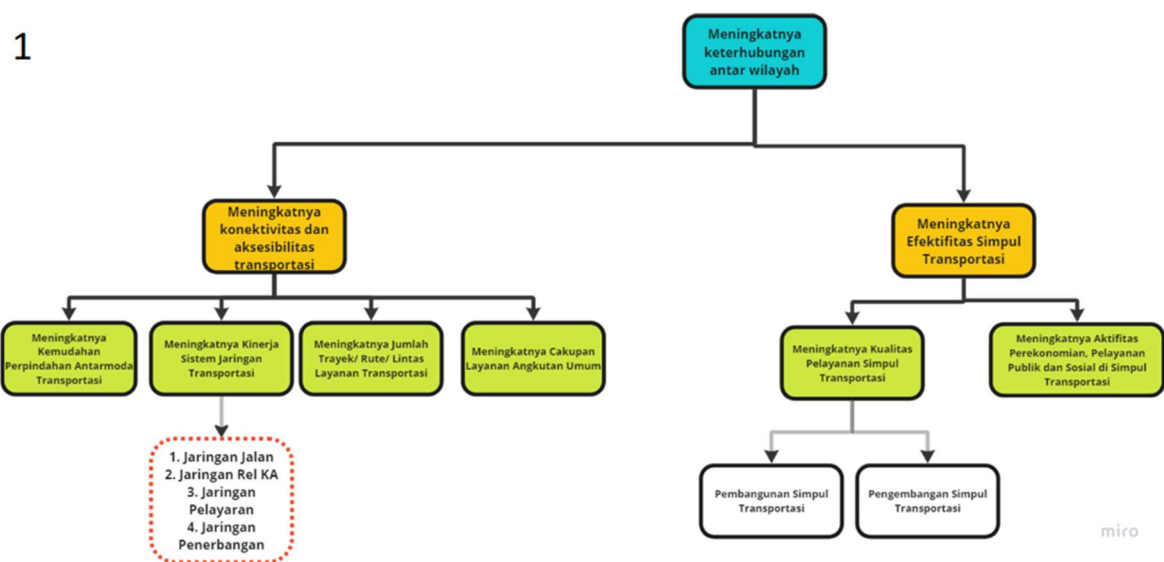
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pohon Kinerja yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama, rencana kerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan

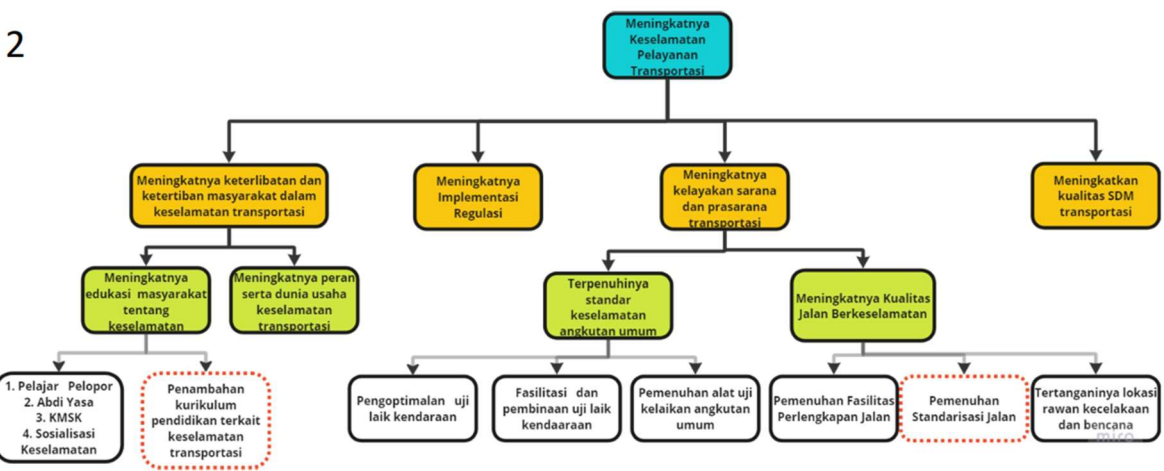
akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas. Pohon kinerja adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan

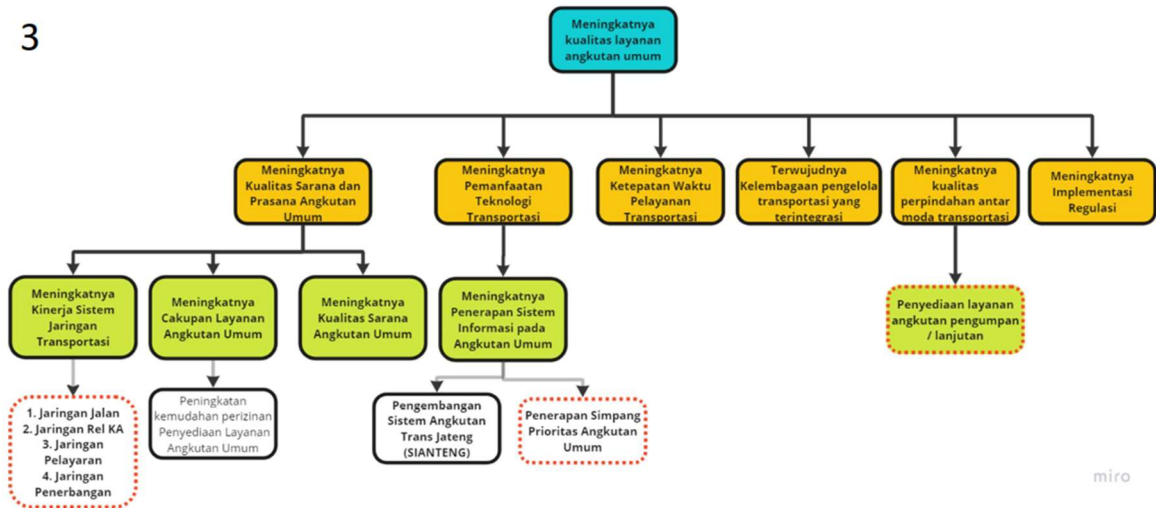


Gambar 1. 2 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Perhubungan



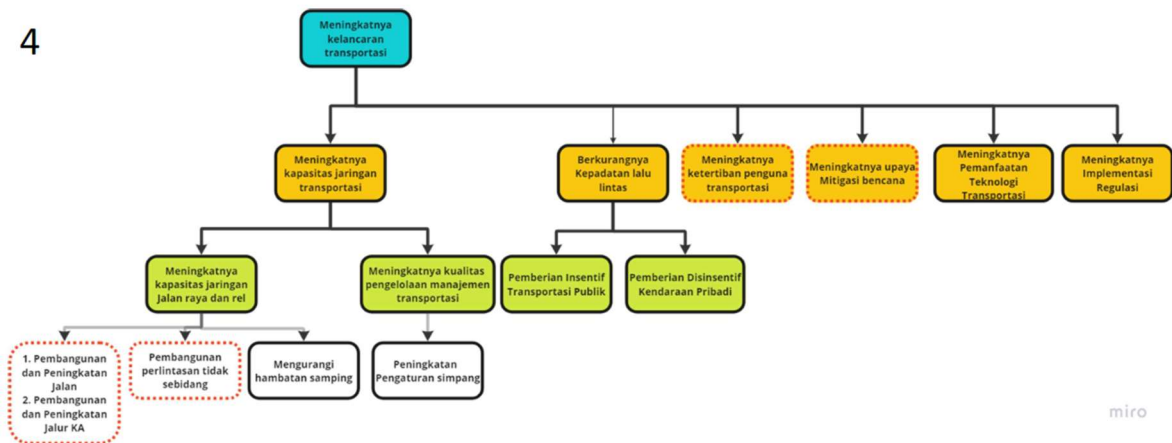
Gambar 1. 3 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Perhubungan

3



Gambar 1. 4 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 3 Dinas Perhubungan

4



Gambar 1. 5 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 4 Dinas Perhubungan

1.2 Isu – isu Strategis

1.2.1 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Perhubungan yang memiliki peran penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor yang diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Jawa Tengah. Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam menunjang Pusat Kegiatan Nasional/Pintu Gerbang Nasional dimana sebagai pendukung perekonomian pulau Jawa Bagian Utara dan Selatan ditunjang dengan adanya Jalan arteri Primer, Kereta Api, Bandara dan Pelabuhan. Serta pendukung pergerakan orang atau barang di 3 (tiga) wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) yang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di sektor pertanian, industri dan pariwisata.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan :

- a) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- b) Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- c) Pelaksanaan dan evaluasi pelopran Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- d) Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.2 Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Bidang Lalu Lintas Jalan
 - a. Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan;
 - b. Masih kurangnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah.
2. Bidang Angkutan Jalan
 - a. Masih kurangnya konektivitas angkutan jalan;
 - b. Masih rendahnya penumpang pada masa angkutan lebaran dan natal.
3. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
 - a. Belum optimalnya Pemanfaatan Terminal;
 - b. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis;
 - c. Belum semua perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar.
4. Bidang Pelayaran
 - a. Belum optimalnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP;
 - b. Masih rendahnya Jumlah lintas Penyeberangan Sungai.
5. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Sejateng
 - a. Masih rendahnya rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti;

- b. DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani belum optimal menurunkan kecelakaan;
 - c. Masih rendahnya keterisian Bus.
6. Balai Transportasi Jawa Tengah
- a. Perpindahan moda angkutan umum belum optimal;
 - b. Belum optimalnya Konektivitas Perkotaan.

1.2.3 Isu Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Isu Strategis

Isu Strategis	Isu Penting yang Perlu ditindaklanjuti	Implementasi Riil
Konektivitas antar wilayah pengembangan	a. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan; b. Peningkatan Konektivitas Perkotaan; c. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis; d. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP.	a. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan, perumusan kebijakan serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b. Peningkatan Konektivitas Perkotaan melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter pada wilayah pengembangan Kedungsepur dan Subosukawonosraten (Pembangunan shelter Trans Jateng sebanyak 6 Unit : Rute Solo – Sumberlawang sebanyak, Rute Semarang – gubug, Rute Solo – Sukoharjo); c. Pembangunan Dermaga Sungai dalam rangka konektivitas antar daerah, Pembangunan Plengsengan Demaga di Ds Yosorejo Kabupaten Batang.
Simpul Transportasi	Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B untuk mendukung Kawasan strategis utamanya pada PKN, konektivitas Jalur Tengah Jawa Tengah serta mendukung operasional trans jateng;	a. Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B utamanya untuk mendukung Kawasan strategis utamanya PKW promosi, menjadikan Terminal bukan hanya menjadi simpul transportasi tetapi juga menjadi sarana edukasi ramah anak dan simpul pendukung operasional trans jateng (Pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo Tahap V, Rehabilitasi Terminal Tipe B Penggaron, Peningkatan Terminal tipe B Sukoharjo) b. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan

Isu Strategis	Isu Penting yang Perlu ditindaklanjuti	Implementasi Riil
		Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Optimalisasi Ruang pergerakan	Meningkatkan Perpindahan moda ke angkutan umum	a. Peningkatan Perpindahan moda ke angkutan umum dengan penyediaan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten); b. Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih melalui pengawasan penyediaan angkutan umum.
Peningkatan Keselamatan Transportasi	a. Meningkatkan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung konektivitas Kawasan strategis yaitu Kawasan wisata Dieng dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. b. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; c. Meningkatkan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah; d. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi;	a. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung jalur penghubung antara Pansela dan Jawa Tengah Utara serta penghubung antar daerah Pariwisata strategis utamanya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dengan Kawasan wisata dieng (Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik 1 Lengan sebanyak 51 Unit, Pengadaan dan Pemasangan Rambu sebanyak 100 buah, Pengadaan dan pemasangan RPPJ sebanyak 8 buah, Pengadaan dan pemasangan marka sebanyak 15.000 meter); b. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi di 6 Lokasi (BSPP Wil I : Ruas Jalan Semarang-Purwodadi Grobogan (1WL, 2 Rambu DRK, 4 Rambu) . BSPP Wil II : smp negeri 1 kunduran blora (1 WL, 2 Rambu DRK, 4 Rambu). BSPP Wil III : Jatinom-Boyolali (1 WL, 4 Rambu), BSPP Wil IV : Wonosobo-Kejajar Kab Wonosob (1 WL, 2 Rambu DRK, 3 Rambu). BSPP Wil V : Bobotsari – Belik (1 WL, 8 Rambu) BSPP Wil VI : Ruas Jl Ketanggung (2 rambu drk 2 rambu 5 beam); c. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar; d. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi di 3 Lokasi (Kab. Cilacap

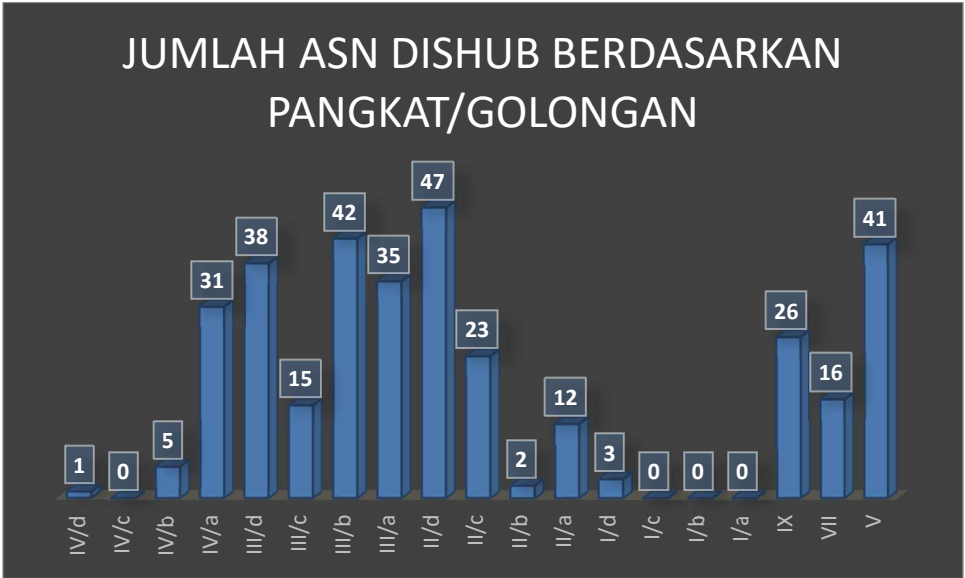
Isu Strategis	Isu Penting yang Perlu ditindaklanjuti	Implementasi Riil
		JPL 2, Kab. Cilacap JPL 464 B, Kab. Cilacap JPL 446 H); e. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada lintas Penyeberangan Sungai.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

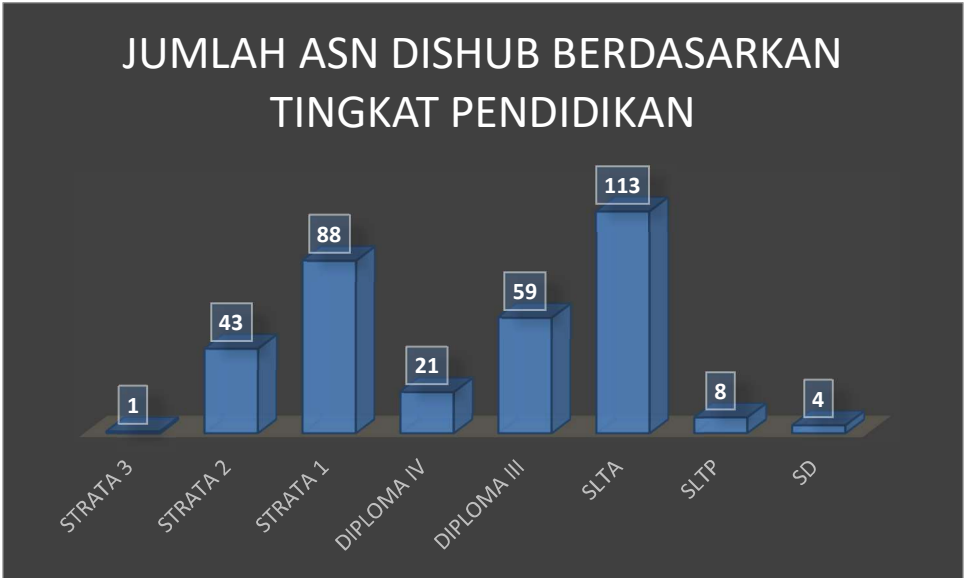
Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Pegawai *Outsourcing* yang total berjumlah 460 terdiri dari 337 ASN (73%) dan 123 PTT (27%). Data Pegawai (ASN) sebagaimana tabel :

Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Lokasi Kerja

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	52
3	Bidang Lalu Lintas Jalan	20
4	Bidang Angkutan Jalan	17
5	Bidang Jaringan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	15
6	Bidang Pelayaran	13
7	BPSPP Wilayah I	30
8	BPSPP Wilayah II	23
9	BPSPP Wilayah III	68
10	BPSPP Wilayah IV	21
11	BPSPP Wilayah V	25
12	BPSPP Wilayah VI	31
13	Balai Transportasi Jawa Tengah	21
	Jumlah	337



Gambar 1. 6 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan (orang)



Gambar 1. 7 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (orang)

Dari data tersebut diketahui bahwa menurut Pangkat/Golongan, ASN yang paling banyak yaitu berpangkat/golongan II/d dengan jumlah 56 (21%) orang dan menurut tingkat pendidikan, ASN yang paling banyak berpendidikan SMU/SMA/SMK dengan 79 Orang (29%) dan berpendidikan Sarjana dengan 72 orang (26%).

Untuk Sumber Daya Aset Dinas Perhubungan sebagaimana tabel :

Tabel 1. 3 Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2025

No.	Kode Barang	Uraian	SALDO AKHIR Periode 2025	
			Jml.	Harga
1	2	3	4	5
1	1.3.1.01	TANAH	98	194.148.233.513,00
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	12	1.922.986.500,00
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	118	30.586.003.326,00
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	123	1.602.016.200,00
5	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.738	8.820.391.223,00
6	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	140	1.700.782.197,00
7	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	6	8.150.000,00
8	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	313	3.367.917.398,00
9	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	74.958.000,00
10	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	2.090	33.269.303.043,00
11	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	1.188	153.654.887.338,00
12	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	1	386.581.815,00
13	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	6	974.927.508,00
14	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	26	32.838.590.089,00
15	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	14	5.200.837.575,00
16	1.3.4.03	INSTALASI	11	198.190.000,00
17	1.3.4.04	JARINGAN	1	73.196.000,00
18	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	16	378.775.000,00
19	1.3.5.05	TANAMAN	42	39.465.000,00

No.	Kode Barang	Uraian	SALDO AKHIR Periode 2025	
			Jml.	Harga
20	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	19	2.860.584.571,00
21	1.3.1.01	TANAH	98	194.148.233.513,00
22	1.3.2.01	ALAT BESAR	12	1.922.986.500,00
23	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	118	30.586.003.326,00
24	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	123	1.602.016.200,00
25	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.738	8.820.391.223,00
26	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	140	1.700.782.197,00
27	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	6	8.150.000,00
28	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	313	3.367.917.398,00
29	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	74.958.000,00
30	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	2.090	33.269.303.043,00
31	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	1.188	153.654.887.338,00
32	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	1	386.581.815,00
33	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	6	974.927.508,00
34	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	26	32.838.590.089,00
35	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	14	5.200.837.575,00
36	1.3.4.03	INSTALASI	11	198.190.000,00
37	1.3.4.04	JARINGAN	1	73.196.000,00
38	1.3.5.02	BARANG BERCORAK Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	16	378.775.000,00
39	1.3.5.05	TANAMAN	42	39.465.000,00
40	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	19	2.860.584.571,00
			5.963	472.106.776.296,00

Sumber : Dinas Perhubungan

Kebutuhan ruangan kantor umum sudah tersedia meliputi ruang kerja, ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Dukungan Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	36.288.305.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.288.305.000
4.1.2	Retribusi Daerah	4.480.823.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	31.807.482.000
5	BELANJA DAERAH	211.929.889.000
5.1	BELANJA OPERASI	192.645.876.000
5.1.1	Belanja Pegawai	45.949.166.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	146.696.710.000
5.2	BELANJA MODAL	19.284.013.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.015.098.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.268.915.000
	Surplus/(Defisit)	(175.641.584.000)

Dukungan Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 211.929.889.000,- terdiri dari Rp. 192.645.876.000,- Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai Rp. 45.949.166.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 146.696.710.000 serta Belanja Modal sebesar Rp. 19.284.013.000,-.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025

Rangkuman Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
1	Menyelaraskan dalam mencantumkan jumlah anggaran antara PK dan DPA pada tahun yang akan datang pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pada Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Jaringan Transportasi, Balai Sarana Prasarana Wil. IV, Balai Sarana Prasarana Wil. VI, Balai Transportasi Jawa Tengah;	Telah dilakukan penyelarasan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan DPA Tahun 2026 pada Bidang dan Balai di Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, bukti dukung sudah kami upload pada alamat yang tertulis pada surat diatas.	https://drive.google.com/drive/folders/1HjPYRMfNNxtmDigxQv_GETfiA9j0quto?usp=sharing
2	Menyelaraskan dalam mencantumkan jumlah anggaran antara PK Perubahan dan LKjIP pada tahun yang akan datang pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pada Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Jaringan Transportasi, Balai Sarana Prasarana Wil. I, Balai Sarana Prasarana Wil. III, Balai Transportasi Jawa Tengah;	Telah dilakukan penyelarasan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan LKjIP Tahun 2025 pada Bidang dan Balai di Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, bukti dukung sudah kami upload pada alamat yang tertulis pada surat diatas.	https://drive.google.com/drive/folders/1cYs8lzdLwi_CzgU0IvMN4ih264G4I-cp?usp=sharing

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Rangkuman Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024 sebagaimana table berikut:

Tabel 1. 6 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	LINK BUKTI DUKUNG
1	Peningkatan kualitas layanan BRT Trans Jateng dalam menjangkau kawasan aglomerasi wilayah di Jawa Tengah	peningkatan layanan dengan penambahan ritase sebanyak 6.570 ritase/ tahun dengan rincian sebagai berikut : 1. Koridor Surakarta – Sukoharjo -Wonogiri 2.190 ritase/tahun; 2. Koridor Semarang – Grobogan 4.380 ritase/tahun. Peningkatan prasarana Trans Jateng yang semula rambu	https://drive.google.com/drive/folders/1yqz_Akr1Pce3hUIsG2jEnXJsWUU7bLhL?usp=sharing

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	LINK BUKTI DUKUNG
		pemberhentian menjadi halte sebanyak 9 unit dengan rincian sebagai berikut: a) Koridor Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri 4 unit; b) Koridor Surakarta-Sragen 3 unit; c) Koridor Semarang-Grobogan 2 unit.	
2	Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan berupa rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan di yang tersebar di ruas jalan Provinsi, Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan utamanya pengadaan dan pemasangan rambu, <i>warning light</i>, dan LPJU di ruas jalan Provinsi	1) Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di 6 lokasi yang tersebar di 6 BPSPP 2) Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan: a) Pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 100 unit; b) Pengadaan dan pemasangan RPPJ sebanyak 10 unit; c) Pengadaan dan pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) sebanyak 402 unit yaitu 38 unit ruas Batur-Dieng; 13 unit ruas Kertek-Sapuran; 41 unit ruas Wadaslintang-Selokromo; 40 Unit ruas Wonogiri-Manyaran-Blimbing; 10 unit ruas Pati-Kayen-Sukolilo; 130 unit di ruas Pemalang - Bantarblang; 45 Unit ruas Randudongkal - Belik / Bts. Kab. Purbalingga; 11 Unit ruas Sukoharjo - Wonogiri; 15 Unit ruas Ngadirojo - Giriwojo; 30 unit ruas Lasem - Sale / Bts. Prov. Jatim; 10 Unit ruas Surakarta - Sukoharjo; dan 19 Unit ruas Demak - Godong serta pergantian lampu sebanyak 323 unit.	https://drive.google.com/drive/folders/1EzBRGs0glv6Ckgl6Onk5MBZzLZCkIIl8?usp=sharing
3	Pembangunan lanjutan Terminal Tipe B Kutoarjo, Kab. Purworejo Tahap 5 sebagai upaya mendukung perekonomian daerah sekitar utamanya Kutoarjo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi Jawa Tengah, Serta Peningkatan Terminal Tipe B Sukoharjo, Kab. Sukoharjo guna peningkatan	Telah dilakukan Pembangunan lanjutan Terminal Tipe B Kutoarjo, Kab. Purworejo Tahap 5 dan Peningkatan Terminal Tipe B Sukoharjo, Kab. Sukoharjo	https://drive.google.com/drive/folders/1VrNryuN2d3KY58b0UNmBqNvNjt_n9p7M?usp=sharing

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	LINK BUKTI DUKUNG
	konektivitas antar wilayah pengembangan		
4	Pelaksanakan FGD dan koordinasi dengan stakeholder terkait mendukung pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis, Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan, Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat serta stakeholders terkait forum lalu lintas dan angkutan Jalan	Telah diadakan FGD terkait Forum Rembug Transportasi Jawa Tengah, Sistem Distribusi Logistik, Transformasi Terminal serta Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	https://drive.google.com/drive/folders/1nmRG0ZsohEhh38tHU68YKtkZ1uEF2PIW?usp=sharing
5	Percepatan pelaksanaan pelepasan aset KMC kartini I	Pelepasan KMC Kartini I sudah dilakukan proses hibah ke Kabupaten Belitung Timur.	https://drive.google.com/drive/folders/1V7waZwOTf-fadNKbuEmrPW7h3Jc4N2KB?usp=sharing

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dengan indikator tujuan indeks pelayanan transportasi, diharapkan pada akhir tahun 2025 mencapai angka 6,276;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah), diharapkan pada Tahun 2025 mencapai angka 78,48.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah, dengan indikator indikator Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan pada tahun 2025 sebesar 15,33;
2. Meningkatnya konektivitas provinsi, dengan indikator Rasio konektivitas provinsi pada tahun 2025 sebesar 0,412;
3. Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum, dengan indikator *On Time Performance* layanan transportasi pada Tahun 2025 sebesar 85,05%.

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 sebesar 80,5;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah, dengan indikator Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2025 sebesar 3,3.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi			Indeks pelayanan transportasi	6,053	6,276	6,532	6,532
		1.1	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	16,098	15,33	14,480	14,480
		1.2	Meningkatnya konektivitas provinsi	Rasio konektivitas provinsi	0,38	0,412	0,457	0,457
		1.3	Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum	<i>On Time Performance</i> layanan transportasi	83,22%	85,05%	86,88%	86,88%
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah			Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	78,28	78,48	78,68	78,68
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,25	80,5	80,75	80,75
		1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,2	3,3	3,4	3,4

2.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah akan dicapai. Rumusan strategi dilakukan melalui metode analisa SWOT dalam melihat Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) dan diformulasikan dalam pohon kinerja yang merupakan landasan berpikir logis dari proses bisnis yang dilakukan. Pohon Kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa. Adapun strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel :

Tabel 2. 2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Meningkatkan keselamatan layanan transportasi dengan meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan implementasi regulasi, serta meningkatkan kualitas SDM Transportasi dan keterlibatan masyarakat;	TAHUN 2024 1. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (2025 : konversi energi angkutan ramah lingkungan, angkutan aglomerasi perkotaan WP Petanglong dan angkutan pedesaan) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B utamanya untuk mendukung Kawasan strategis utamanya pada PKN dan PKW promosi dan kawasan perbatasan; 3. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 4. Peningkatan Konektivitas Perkotaan melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Purwomanggung dan Subosukawonosraten; 5. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai penghubungan kab. Batang dan kab. Kendal serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional. TAHUN 2025 1. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan, perumusan kebijakan (angkutan aglomerasi perkotaan WP Bregasmalang) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B utamanya untuk mendukung Kawasan strategis utamanya PKW promosi, KIT Batang dan simpul pendukung operasional trans Jateng; 3. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
				terminal tipe B dan Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 4. Peningkatan Konektivitas Perkotaan melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter pada wilayah pengembangan Kedungsepur dan Subosukawonosraten; 5. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai penghubung kab. Batang dan kab. Kendal serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional. TAHUN 2026 1. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B utamanya untuk mendukung Kawasan strategis utamanya pada PKW promosi, Kawasan perbatasan dan kawasan penghubung Pantura dan Jalur tengah; 3. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 4. Peningkatan Konektivitas Perkotaan melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter pada wilayah pengembangan Kedungsepur dan Subosukawonosraten; 5. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai penghubung kab. Brebes dan KotaTegal serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.
		Meningkatnya konektivitas provinsi	Meningkatkan keterhubungan antar melalui dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi, meningkatkan kemudahan perpindahan Antarmoda serta mengembangkan sistem jaringan dan simpul transportasi;	TAHUN 2024 1. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan dan kawasan pariwisata; 2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Pelaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar; 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi; 5. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada lintas Penyeberangan Sungai.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
				TAHUN 2025 1. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung jalur penghubungan pansela, jalur tengah dan pantura Jawa Tengah; 2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar; 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi; 5. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada lintas Penyeberangan Sungai. TAHUN 2026 1. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung jalur sejajar pantura; 2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar; 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi; 5. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada lintas Penyeberangan Sungai.
		Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum	Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, mengoptimalkan penerapan teknologi dan meningkatkan integrasi antar moda transportasi	TAHUN 2024 1. Peningkatan Perpindahan moda ke angkutan umum dengan penyediaan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten); 2. Meningkatkan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih melalui pengawasan penyediaan angkutan umum. TAHUN 2025 1. Peningkatan Perpindahan moda ke angkutan umum dengan penyediaan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten) serta konversi energi angkutan ramah lingkungan pada WP Kedungsepur (Koridor Semarang -Bawen); 2. Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih melalui pengawasan penyediaan angkutan umum. TAHUN 2026 1. Peningkatan Perpindahan moda ke angkutan umum dengan penyediaan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten) serta dankonversi energi angkutan ramah lingkungan pada pada WP Kedungsepur (Koridor Semaran -Bawen) WP

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
				Barlingmascakeb (Koridor Purwokerto-Purbalingga); 2. Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih melalui pengawasan penyediaan angkutan umum.
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	TAHUN 2024-2026 1. Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah; 2. Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; 3. Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah; 4. Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah; 5. Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset; 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah; 7. Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	TAHUN 2024-2026 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2. 3 Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,276
1.1	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,33
1.2	Meningkatnya konektivitas provinsi	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,412
1.3	Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum	On Time Performance layanan transportasi	%	85,05
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78,48
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,5
2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,3

2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Secara lengkap tabel program dan kegiatan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2025 Perubahan Pada Urusan Perhubungan

Program dan Kegiatan 1	Indikator 2	Satuan 3	Target 4	Anggaran 5
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka	0,56	405.783.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio angkutan taksi terpenuhi	Angka	0,44	17.374.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio angkutan barang yang berijin	Angka	0,32	19.810.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Angka	0,62	25.000.000
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	Angka	1	19.975.000
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Angka	0,09	17.790.000

Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Angka	0,86	305.834.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Pemanfaatan Terminal	Angka	0,229	5.993.000.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio terminal Tipe B dalam kondisi baik	Angka	0,41	5.993.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0,52	327.656.000
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rasio Implementasi Dokumen RIJLLAJ	Angka	0,5	327.656.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,25	354.000.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,56	354.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,02	47.950.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,5	47.950.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus Balai pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,21	1.032.532.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,5	1.032.532.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,24	88.750.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,5	88.750.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,18	199.140.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,5	199.140.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,22	256.270.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,5	256.270.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Perkotaan	Angka	0,486	959.721.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Angka	0,627	959.721.000
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0,378	748.180.000
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah	Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasar kan tingkatannya	Angka	0,4	32.257.000

Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan				
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Angka	0,53	640.000.000
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Angka	0,13	37.387.000
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Berth occupancy ratio	Angka	0,45	38.536.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,4	8.392.706.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupaten /Kota	17	22.916.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ	Dokumen	12	35.194.000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi	Dokumen	390	37.316.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Rasio pemenuhan perlengkapan jalan	Angka	0,64	8.297.280.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,95	1.225.882.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,11	1.225.882.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,94	1.425.725.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,19	1.425.725.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,95	1.326.040.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,33	1.326.040.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,94	1.583.760.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,14	1.583.760.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,95	1.951.895.000

Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,50	1.951.895.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,95	1.516.072.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,24	1.516.072.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kendaraan laik jalan di jawa tengah	Angka	0,985	121.283.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Unit	439.863	121.283.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,84	181.075.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	2.340	181.075.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,84	93.328.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Unit	1.038	93.328.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,84	358.208.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	22.676	358.208.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,84	166.530.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	7.071	166.530.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,84	166.090.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Unit	4.198	166.090.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,84	198.855.000

Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	3.659	198.855.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,08	1.074.842.000
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Angka	0,36	1.074.842.000
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio pemenuhan Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0,4	26.160.000
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi	Angka	0,18	26.160.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perpindahan moda angkutan umum	%	53	116.771.669.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Orang	6.944.462	116.771.669.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	67,34	696.815.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Orang	27.824.836	696.815.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	175.628.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	175.628.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	%	100	62.916.320.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	46.662.329.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	938.616.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	83.875.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	952.969.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	2.216.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	10.250.885.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	283	1.811.646.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	%	100	131.049.000

Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.840.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	20.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	31.709.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	%	100	102.684.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	55.184.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	7.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	36.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	%	100	188.314.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1.717.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100.159.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	45.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	38.338.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	%	100	137.454.000

Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	75.245.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	25.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	32.709.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	%	100	143.114.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.050.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	92.280.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	15.075.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	9	31.709.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	%	100	154.309.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	91.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	26.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	13	32.409.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	291.100.000

Program dan Kegiatan 1	Indikator 2	Satuan 3	Target 4	Anggaran 5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	29.100.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	5.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	252.500.000

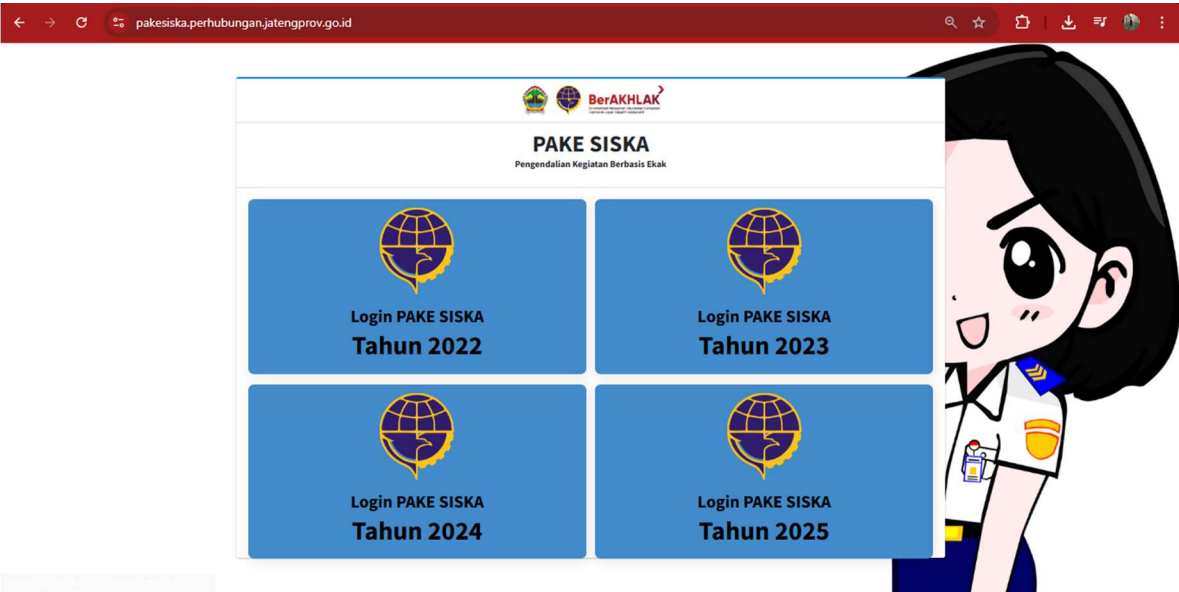
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja adalah Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah (GRMS) adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi jawa tengah. Sistem aplikasi yang terdiri atas; system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan gph, serta aplikasi networking terdiri atas; system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude dan SIPD pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan public dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

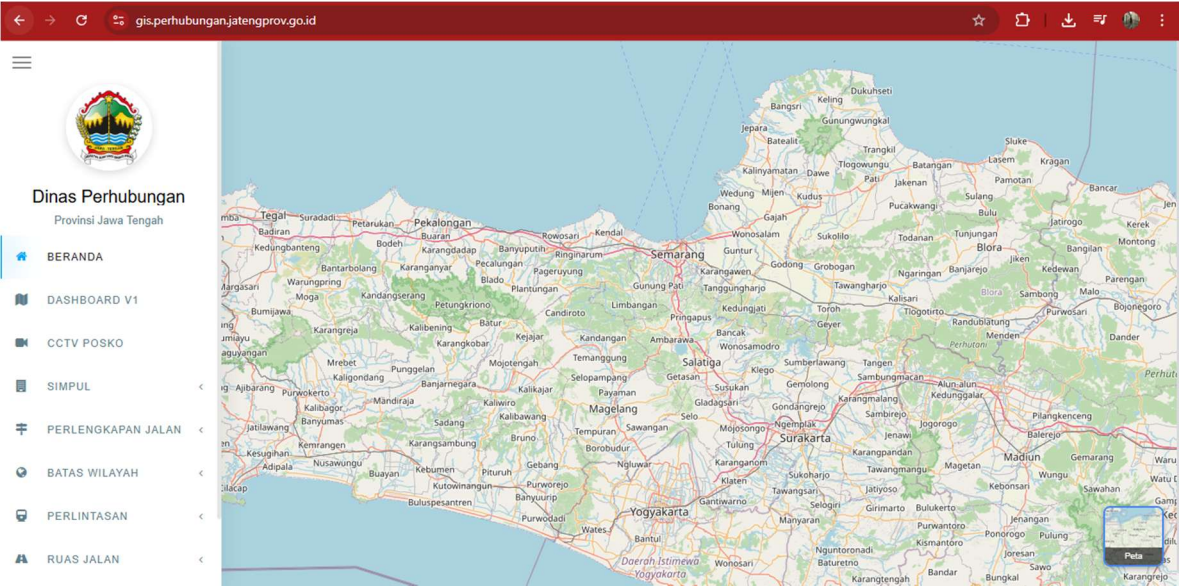
Selain itu terdapat aplikasi yang digunakan secara internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja berbasis Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan berbasis teknologi informasi berupa Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan berbasis e Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan (**Pake-Siska**). Aplikasi ini digunakan sebagai pengumpulan data kinerja dan alat untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang menyajikan data pelaksanaan kegiatan secara actual, cepat dan mudah diakses dalam rangka pencapaian akuntabilitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal Pemetaan Simpul dan Fasilitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Secara Geografis Dinas Perhubungan membangun sistem aplikasi berupa Sistem Informasi Geografis yang memuat sebaran lokasi, rencana kebutuhan dan kondisi eksisting terkait simpul transportasi berupa Terminal tipe B, Perlintasan sebidang Kereta Api, shelter BRT, Daerah Rawan Kecelakaan, Area Traffic

Management System dan perlengkapan jalan yang menjadi sumber data perencanaan program kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2. 1 Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan berbasis e Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan (**Pake-Siska**)



Gambar 2. 2 Sistem Informasi Geografis

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Produk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Tingkat Ketercapaian Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	> 100%;
2	Tinggi	85 – 100%;
3	Sedang	65 – 84,99%;
4	Rendah	50 - 64,99%;
5	Sangat Rendah	< 50%

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. sebagaimana berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
A	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,276	6,3	100,38	6,532

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,33	15,33	100	14,48
2	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PROVINSI	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,412	0,43	104,36	0,457
3	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN UMUM	On Time Performance layanan transportasi	%	85,05	85,2	100,17	86,88
B	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78,48	86,57	110,30	78,68
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,5	83	103,10	80,75
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,3	3,11	94,24	3,4

Dari tabel diatas diketahui bahwa Realisasi capaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah mencapai nilai yang ditargetkan. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah serta mendukung Ketercapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan didukung melalui 3 program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian.

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan “Sangat Tinggi” yaitu dengan capaian tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dengan Indikator Indeks Pelayanan Transportasi mencapai angka 6,3 dan capaian tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah dengan tingkat capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 86,57. sebagaimana berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Katagori
A	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,276	6,3	100,38	Sangat Tinggi

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Katagori
1	MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,33	15,33	100	Tinggi
2	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PROVINSI	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,412	0,43	104,36	Sangat Tinggi
3	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN UMUM	On Time Performance layanan transportasi	%	85,05	85,2	100,17	Sangat Tinggi
B	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78,48	86,57	110,30	Sangat Tinggi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,5	83	103,10	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,3	3,11	94,24	Tinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa Tingkat Ketercapaian Kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam urusan Perhubungan dan Urusan Penunjang masuk katagori Sangat Tinggi.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 3 tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	-	-	-	6,05	6,12	101,11	6,276	6,3	100,38
1	MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	-	-	-	16,098	16,089	100,06	15,33	15,33	100
2	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PROVINSI	Rasio konektivitas provinsi	Angka	-	-	-	0,38	0,40	105,26	0,412	0,43	104,36
3	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN UMUM	On Time Performance layanan transportasi	%	-	-	-	83,22	84,60	101,66	85,05	85,2	100,17
B	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	-	78,28	85,09	108,70	78,48	86,57	110,30
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	80,25	81,50	101,56	80,5	83	103,10
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	-	3,20	3,03	94,69	3,3	3,11	94,24

Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun sebelumnya mengalami peningkatan baik dalam urusan Pemerintah Bidang Perhubungan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk capaian kinerja pertahunnya selama 3 (tiga) tahun sebelumnya tercapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$. Terdapat perbedaan indikator tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra 2018-2023 dan dokumen Renstra 2024-2026 karena diselaraskan dengan dokumen Renstra Kementerian Perhubungan dan peraturan terbaru. Perubahan tersebut berpengaruh pada dokumen Renja 2025 serta Perjanjian Kinerja 2025. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
A	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,276	6,3	100,38
1	MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,33	15,33	100
2	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PROVINSI	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,412	0,43	104,36
3	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN UMUM	On Time Performance layanan transportasi	%	85,05	85,2	100,17
B	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78,48	86,57	110,30
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,5	83	103,10
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,3	3,11	94,24

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pada tahun 2025 capaian kinerjanya sebagian besar tercapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Akhir RPJMD

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun akhir RPJMD disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun terakhir RPJMD sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Akhir RPJMD

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
A	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI	Indeks Pelayanan Transportasi	6,3	6,532	96,44
1	MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	15,33	14,48	94,45
2	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PROVINSI	Rasio konektivitas provinsi	0,43	0,457	94,09
3	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN UMUM	On Time Performance layanan transportasi	85,2	86,88	98,06
B	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	86,57	78,68	110,02
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	80,75	102,78
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,11	3,4	91,47

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Kemenhub 2025
A	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,3	-
1	MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,33	19,242
2	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PROVINSI	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,43	0,77
3	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN UMUM	On Time Performance layanan transportasi	%	85,2	75,30
B	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	86,57	85,26
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	94,74

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Kemenhub 2025
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,11	-

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3. 8 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
A	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,276	6,3	100,38	koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien	
1	MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,33	15,33	100	koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien	
2	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PROVINSI	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,412	0,43	104,36	Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien	
3	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN UMUM	On Time Performance layanan transportasi	%	85,05	85,2	100,17	Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
							terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien	
B	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78,48	86,57	110,30	Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,5	83	103,10	Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien	
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,3	3,11	94,24	Berdasarkan hasil penilaian PM Maturitas SPIP terdapat 4 catatan : - Perumusan pernyataan risiko berdasarkan kemungkinan kejadian - Melakukan analisis akar penyebab risiko secara sistematis - Melakukan Penghapusan duplikasi risiko yang memiliki penyebab yang sama - Memperluas penilaian risiko dengan menambah ruang lingkup risiko kemitraan dan risiko fraud pada Rencana Kerja Tahun 2026	Tindak lanjut atas penilaian PM Maturitas SPIP: - Telah dilakukan perumusan risiko pada penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 - Telah dilakukan penilaian risiko kemitraan dan risiko fraud pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat alokasi anggaran sehingga perlu adanya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel.

Tabel 3. 9 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI	Indeks Pelayanan Transportasi	6,276	6,3	100,38	147.689.917.000	146.295.160.737	99,06	0,94
1	MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	15,33	15,33	100	19.808.451.000	19.453.077.503	98,21	1,79
2	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PROVINSI	Rasio konektivitas provinsi	0,412	0,43	104,36	10.412.982.000	10.320.421.441	99,11	0,89
3	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN UMUM	On Time Performance layanan transportasi	85,05	85,2	100,17	117.468.484.000	116.521.661.793	99,19	0,81
B	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	78,48	86,57	110,30	64.239.972.000	60.844.811.329	94,71	5,29
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	83	103,10	64.064.344.000	60.672.650.429	94,71	5,29
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,3	3,11	94,24	175.628.000	172.160.900	98,03	1,97

Dalam rangka pencapaian tujuan 1 (satu) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi terealisasi anggaran sebesar Rp 146,295,160,737 atau 99,06% dari total pagu sebesar Rp 147,689,669,000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 1,394,756,263 atau 0,94% dari pagu yang dianggarkan. Meskipun anggaran belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

Untuk pencapaian tujuan 2 (dua) Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah terealisasi anggaran sebesar Rp 60,844,811,329 atau 94,71% dari total pagu sebesar Rp 64,239,972,000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 3,219,532,671 atau 5,29% dari pagu yang dianggarkan. Meskipun anggaran belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan “Sangat Tinggi” yaitu dengan capaian tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dengan Indikator Indeks Pelayanan Transportasi sebesar 100,38%. Dalam tujuan 1 (satu) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) program. Tingkat ketercapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
A	TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI					
	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,276	6,3	100,38	
1	SASARAN : MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH					
	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,33	15,33	100	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,38	0,38	100	Menunjang
	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0,98	0,99	100,92	Menunjang
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,97	0,97	100	Menunjang
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,81	0,82	101,23	Menunjang

	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,97	0,97	100	Menunjang
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,81	0,83	102,47	Menunjang
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,98	0,98	100	Menunjang
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,81	0,83	102,47	Menunjang
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,97	0,97	100	Menunjang
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,81	0,83	102,47	Menunjang
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,98	0,98	100	Menunjang
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,81	0,82	101,23	Menunjang
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,97	0,97	100	Menunjang
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,81	0,82	101,23	Menunjang
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0,2	0,2	100	Menunjang
1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,04	0,04	100	Menunjang
2	SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PROVINSI					
	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,412	0,43	104,36	
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					

	Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0,51	0,51	100	Menunjang
	Rasio pemanfaatan terminal	Angka	0,22	0,22	100,92	Menunjang
	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0,5	0,5	100	Menunjang
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,24	0,26	108,33	Menunjang
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,01	0,01	100	Menunjang
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,2	0,22	110	Menunjang
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,23	0,25	108,7	Menunjang
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,17	0,17	100	Menunjang
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,21	0,21	100	Menunjang
	Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0,48	0,51	106,03	Menunjang
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0,31	0,33	106,45	Menunjang
3	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN UMUM					
	On Time Performance layanan transportasi	%	85,05	85,2	100,17	Menunjang
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	65,38	65,45	100,11	Menunjang
	Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	51,72	52,22	100,97	Menunjang
	Total Indikator Program				29	
	Total Sangat Tinggi				29	
	Total Tinggi				0	
	Total Sedang				0	
	Total Rendah				0	
	Total Sangat Rendah				0	

Sumber : e-controlling 2025

Capaian Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan “Sangat Tinggi” yaitu dengan capaian tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah dengan Indikator persentase Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) sebesar 110,30%. Dalam tujuan 2 (dua)

Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 1 (satu) program. Tingkat ketercapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
A	TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah					
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78,48	86,57	110,30	
1	SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,5	83	103,10	
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	100	100	Menunjang
2	SASARAN : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah					
	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,3	3,11	94,24	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
2.1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Total Indikator				9	
	Total Sangat Tinggi				9	
	Total Tinggi				0	
	Total Sedang				0	
	Total Rendah				0	
	Total Sangat Rendah				0	

TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI

a. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah

Sasaran berupa Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah dengan indikator Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan capaiannya 100% dengan realisasi rasio sebesar 15,33. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 14 (empat belas) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah. Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) ini dicapai diantaranya dari pemenuhan fasilitas keselamatan jalan berupa rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan di 6 titik yang tersebar di 6 Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (BPSPP), Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu sebanyak 100 unit, rambu pendahulu petunjuk jalan (RPPJ) sebanyak 10 unit, serta Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 402 unit di ruas jalan Provinsi.



Gambar 3. 1 Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan



Gambar 3. 2 Pemasangan Perlengkapan Jalan

Program Pengelolaan Pelayaran mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Pelayaran ini dicapai diantaranya dari pemenuhan fasilitas keselamatan pelayaran berupa

penyerahan 6 buah *life jacket*, pemasangan 2 rambu larangan dan 2 rambu peringatan keselamatan penyeberangan sungai.



Gambar 3. 3 Penyerahan Life Jacket



Gambar 3. 4 Pemasangan Rambu Peringatan Keselamatan Penyeberangan Sungai

Program Pengelolaan Perkeretaapian mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Perkeretaapian ini dicapai dari pemasangan perlengkapan jalan pada 3 lokasi di Kab. Cilacap, dengan rincian: pemasangan Rambu *Cross Andrea* sebanyak 2 unit, Rambu Peringatan Gerak Arah Lalin sebanyak 2 unit dan Marka 575,45 m2 di JPL 2; pemasangan Rambu Peringatan 1 sebanyak 2 unit, Rambu Peringatan 2 sebanyak 2

unit dan Marka 1654,6 m2 di JPL 464B; dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum sebanyak 5 unit di JPL 446H.



Gambar 3. 5 Pemasangan Rambu Peringatan



Gambar 3. 6 Pemasangan Rambu *Cross Andrea*

b. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya konektivitas provinsi

Sasaran berupa Meningkatnya konektivitas provinsi dengan indikator Rasio konektivitas provinsi capaiannya 104,36% dengan realisasi rasio sebesar 0,43 dari target 0,412. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 2 (tiga) program yaitu Program

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 10 (sepuluh) indikator yang mendukung capaian Sasaran 2 : Meningkatnya konektivitas provinsi. Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) ini dipengaruhi diantaranya dari pelaksanaan revitalisasi 1 unit Terminal Tipe B di Terminal Sukoharjo, pemeliharaan atau rehab 13 unit terminal Tipe B dan pembangunan 1 unit Terminal Tipe B Kutoarjo tahap 5 yang mencapai tahap pekerjaan pembangunan lantai 2 gedung kedatangan, kanopi anjungan dan selasar, saluran drainase, pekerjaan elektrikal serta pekerjaan fasilitas penunjang terminal.



Gambar 3. 7 Pembangunan Terminal Kutoarjo Tahap 5

Program Pengelolaan Pelayaran mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas provinsi. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Pelayaran ini dipengaruhi diantaranya dari Penerbitan 14 dokumen Izin Usaha Jasa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan terpenuhinya fasilitasi persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pada 8 unit Pelabuhan Pengumpan Regional di Pelabuhan Batang, Pelabuhan

Kendal, Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Juwana, Pelabuhan Tasik Agung, Pelabuhan Sluke, Pelabuhan Karimunjawa, dan Pelabuhan Legon Bajak.

c. Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum

Sasaran berupa Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum dengan indikator On Time Performance layanan transportasi capaiannya 100,17% dengan realisasi 85,2% dari target 85,05%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 2 (dua) indikator yang mendukung capaian Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum. Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) ini dipengaruhi dari peningkatan layanan dengan penambahan ritase sebanyak 6.570 ritase/tahun dan peningkatan prasarana Trans Jateng yang semula rambu pemberhentian menjadi halte sebanyak 9 unit.



Gambar 3. 8 Peningkatan Prasarana Trans Jateng

TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH

a. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat capaiannya 103,10% dengan realisasi 83 dari target 80,5. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan ketercapaian meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan IKM pada Tahun 2025 untuk masing – masing pelayanan publik di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai hasil IKM 83 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya.

b. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP nilai Manajemen Risiko pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 3,11. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 211.929.889.000,- dan terelasisasi sebesar 207.139.972.066,- (97,74%). Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Dinas Perhubungan	211.929.889.000	207.139.972.066	97,74
Sekretariat - Dinas Perhubungan	63.091.948.000	59.720.495.206	94,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.091.948.000	59.720.495.206	94,66
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.628.000	172.160.900	98,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.662.329.000	43.807.812.578	93,88
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	938.616.000	800.081.921	85,24
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.875.000	57.951.000	69,09
Administrasi Umum Perangkat Daerah	952.969.000	946.238.217	99,29
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.216.000.000	2.212.943.000	99,86

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.250.885.000	9.971.095.784	97,27
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.811.646.000	1.752.211.806	96,72
Bidang Lalu Lintas	8.513.989.000	8.412.652.950	98,81
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.513.989.000	8.412.652.950	98,81
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	8.297.280.000	8.197.587.950	98,80
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	58.110.000	58.110.000	100,00
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	37.316.000	37.213.000	99,72
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	121.283.000	119.742.000	98,73
Bidang Angkutan Jalan	1.102.598.000	1.083.104.700	98,23
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.102.598.000	1.083.104.700	98,23
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	716.625.000	705.383.450	98,43
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	305.834.000	298.155.750	97,49
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.790.000	17.573.000	98,78
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	24.955.000	99,82
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.374.000	17.271.000	99,41
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.975.000	19.766.500	98,96
Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	7.395.498.000	7.359.880.358	99,52
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.320.656.000	6.288.150.768	99,49
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	327.656.000	326.050.900	99,51
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	5.993.000.000	5.962.099.868	99,48
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.074.842.000	1.071.729.590	99,71
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.074.842.000	1.071.729.590	99,71
Bidang Pelayaran	774.340.000	760.595.450	98,22
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	774.340.000	760.595.450	98,22
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	32.257.000	31.319.900	97,09
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	37.387.000	37.387.000	100,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	38.536.000	38.226.000	99,20
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	666.160.000	653.662.550	98,12
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	1.892.006.000	1.855.771.900	98,08
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	131.049.000	130.390.000	99,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.840.000	74.800.000	99,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	20.000.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.709.000	31.090.000	98,05
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.760.957.000	1.725.381.900	97,98
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	354.000.000	351.514.000	99,30
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.225.882.000	1.200.712.900	97,95
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	181.075.000	173.155.000	95,63
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	1.669.687.000	1.611.769.000	96,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.684.000	101.606.000	98,95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.184.000	54.457.000	98,68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	7.000.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000	35.649.000	99,03
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.567.003.000	1.510.163.000	96,37
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	47.950.000	47.593.000	99,26
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.425.725.000	1.370.610.000	96,13
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	93.328.000	91.960.000	98,53
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	2.905.094.000	2.847.242.200	98,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	188.314.000	182.729.500	97,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.717.000	1.717.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.159.000	96.943.500	96,79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.600.000	44.400.000	97,37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.338.000	37.169.000	96,95
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.716.780.000	2.664.512.700	98,08
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1.032.532.000	1.014.274.000	98,23
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.326.040.000	1.297.832.800	97,87
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	358.208.000	352.405.900	98,38
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	1.976.494.000	1.932.462.840	97,77

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	137.454.000	134.827.000	98,09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.542.000	77,10
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.245.000	73.561.000	97,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	25.000.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.709.000	32.224.000	98,52
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.839.040.000	1.797.635.840	97,75
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	88.750.000	86.687.000	97,68
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.583.760.000	1.546.818.840	97,67
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	166.530.000	164.130.000	98,56
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	2.460.239.000	2.395.243.902	97,36
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	143.114.000	133.712.500	93,43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.050.000	2.050.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.280.000	92.049.000	99,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.075.000	6.305.500	41,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.709.000	31.308.000	98,74
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.317.125.000	2.261.531.402	97,60
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	199.140.000	196.757.000	98,80
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.951.895.000	1.901.090.902	97,40
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	166.090.000	163.683.500	98,55
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	2.125.506.000	2.085.192.121	98,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	154.309.000	152.718.000	98,97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.100.000	55,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.000.000	90.750.000	99,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.400.000	26.400.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.409.000	31.968.000	98,64
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.971.197.000	1.932.474.121	98,04
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	256.270.000	252.315.000	98,46
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.516.072.000	1.484.184.121	97,90
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	198.855.000	195.975.000	98,55
Balai Transportasi Jawa Tengah	118.022.490.000	117.075.561.439	99,20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	291.100.000	288.333.123	99,05
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.500.000	75,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	2.495.000	99,80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.100.000	28.938.500	99,45
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	3.805.200	76,10
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.500.000	251.594.423	99,64

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	117.731.390.000	116.787.228.316	99,20
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	959.721.000	951.241.473	99,12
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	116.771.669.000	115.835.986.843	99,20

Pada Tabel Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 diatas terdapat beberapa kegiatan dengan persentase capaian rendah yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 69,09% disebabkan karena pelaksanaan diklat banyak dilaksanakan secara virtual, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah V dengan capaian sebesar 41,83% disebabkan karena jasa retribusi pengolahan sampah pada terminal sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dimana nominal retribusi sampah lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan, dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI dengan capaian sebesar 55% disebabkan honor pejabat pengadaan tidak terserap karena pejabat pengadaan berasal dari fungsional Biro APBJ.

3.3 Inovasi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya pembaharuan agar dapat mencapai kinerja dinas. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan inovasi terhadap beberapa sistem yang ada, dalam hal ini inovasi pada pengembangan aplikasi Si Anteng untuk mempermudah pengguna Trans Jateng serta upgrade *operating system* untuk IOS dan Android. Aplikasi Si Anteng merupakan aplikasi yang dapat memberikan kemudahan kepada penumpang BRT Trans Jateng yang dilengkapi dengan beberapa fitur yaitu: jadwal kedatangan bus secara real time, panduan rute BRT Trans Jateng, letak lokasi halte terdekat serta saat ini sudah dilengkapi dengan fitur pembelian tiket secara online. Dengan fitur – fitur tersebut maka akan memudahkan calon penumpang BRT Trans Jateng saat ingin menggunakan layanan BRT Trans Jateng. Calon penumpang BRT Trans Jateng dapat dengan mudah mencari halte terdekat melalui aplikasi SI ANTENG. Calon

penumpang juga dapat melihat panduan rute BRT Trans Jateng melalui aplikasi SI ANTENG sehingga calon penumpang tidak perlu menunggu lama di halte karena tidak mengetahui jadwal kedatangan bus atau bus tidak berhenti pada halte yang dilewati. Aplikasi SI ANTENG juga dilengkapi dengan informasi layanan dan perubahan layanan serta dapat digunakan untuk menyampaikan kritik dan saran. Fitur terbaru dari aplikasi SI ANTENG yang telah dikembangkan saat ini adalah fitur pembelian secara online menggunakan aplikasi SI ANTENG yang bekerjasama dengan penyedia layanan pembayaran digital ASTRAPAY sehingga dapat memudahkan calon penumpang dalam pembelian tiket agar mengurangi antrian pembelian tiket di halte. Aplikasi ini sudah dikembangkan dan dapat digunakan pada semua koridor BRT Trans Jateng dengan total 7 koridor. Selain fitur – fitur diatas aplikasi SI ANTENG juga digunakan sebagai sistem untuk pemantauan dan pengawasan di lapangan terkait operasional serta untuk mendapatkan data rekam jejak mobilitas BRT Trans Jateng.



Gambar 3. 9 Aplikasi Si-Anteng

3.4 Penghargaan

Sebagai wujud kinerja nyata urusan perhubungan, Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan perhubungan tahun 2025 yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan juara 1 Pembina terbaik dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.



Gambar 3. 10 Penghargaan juara 1 Pembina terbaik dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mendukung Visi Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024-2026, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2024-2026 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh "Isu Strategis" sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Rata – rata tingkat ketercapaian indikator tujuan sebesar 105,34% dan untuk rata – rata tingkat ketercapaian indikator sasaran sebesar 100,37%. Dengan demikian rata – rata tingkat ketercapaian indikator tujuan dan sasaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam kategori "Sangat Tinggi".

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 2 (dua) tujuan dan 5 sasaran, yaitu

Tujuan Pertama : Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah dengan indikator Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan mencapai 100% dengan realisasi rasio sebesar 15,33. Ketercapaian Sasaran didukung oleh : 2 (dua) program yaitu Program

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran.

- b) Sasaran 2 : Meningkatnya konektivitas provinsi dengan indikator Rasio konektivitas provinsi mencapai 104,36% dengan realisasi rasio sebesar 0,43 dari target 0,412. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian;
- c) Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum dengan indikator On Time Performance layanan transportasi mencapai 101,66% dengan realisasi 85,2% dari target 85,05%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Tujuan Kedua : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah. Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan IKM pada Tahun 2025 untuk masing – masing pelayanan publik di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai hasil IKM 83 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya.
 - b) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah. Hasil penilaian Manajemen Risiko Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 3,11.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dengan menggunakan anggaran kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 207.139.972.066 atau (97,74%) dari total anggaran sebesar Rp. 211.929.889.000 namun realisasi fisik tercapai 100%.
3. Beberapa tantangan terkait pelaksanaan program / kegiatan dalam penyelesaian isu strategis pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
- a) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan AKDP dan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan.
 - b) Kesenjangan wilayah terkait dengan ruang pergerakan, konektivitas dan simpul transportasi antara desa-kota maupun antara kota-kota (kawasan aglomerasi perkotaan) dan antar wilayah utamanya aksesibilitas – konektivitas wilayah Pantura – Pansela dan wilayah tengah Jawa Tengah.

- c) Mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum serta revitalisasi dan subsidi angkutan umum agar tetap beroperasi dan diminati.
- d) Mewujudkan sistem transportasi berbasis digital yaitu kebutuhan transformasi menuju sistem transportasi yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- e) Keselamatan transportasi di Jawa Tengah bersifat multidimensional: infrastruktur, perilaku, kelembagaan, dan pengawasan. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi pada kolaborasi lintas sektor dan perubahan budaya keselamatan masyarakat

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan BRT Trans Jateng dalam menjangkau kawasan aglomerasi wilayah di Jawa Tengah;
2. Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan berupa rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan di yang tersebar di ruas jalan Provinsi, Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan utamanya pengadaan dan pemasangan rambu, *warning light*, dan LPJU di ruas jalan Provinsi;
3. Pembangunan lanjutan Terminal Tipe B Kutoarjo, Kab. Purworejo Tahap 6 sebagai upaya mendukung perekonomian daerah sekitar utamanya Kutoarjo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi Jawa Tengah, Serta Revitalisasi Terminal Tipe B Sukoharjo, Kab. Sukoharjo guna peningkatan konektivitas antar wilayah pengembangan;
4. Pelaksanakan FGD dan koordinasi dengan stakeholder terkait mendukung pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis, Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan, Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat serta stakeholders terkait forum lalu lintas dan angkutan Jalan.

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025